

## Analisis Beban Penerangan dan Daya Listrik untuk Perencanaan Sistem PLTS di Lapangan Sasmita Jaya

Widodo Rizki<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang, Indonesia

[orlandozoltan23@gmail.com](mailto:orlandozoltan23@gmail.com)

Alamat: Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/3, Jakarta Selatan

**Abstrak.** Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang berperan penting dalam praktik demokrasi modern, khususnya dalam mendorong kebebasan berekspresi dan partisipasi politik masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya penyebaran ujaran kebencian (hate speech), hoaks, dan manipulasi informasi yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Di Indonesia, fenomena tersebut semakin kompleks akibat tingginya penggunaan media sosial, keberagaman sosial-politik, serta keberadaan aktor digital seperti buzzer politik yang secara terstruktur membentuk opini publik, terutama pada masa Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis hubungan antara ujaran kebencian, penggunaan media sosial, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian bersifat non-empiris dengan mengkaji 20 artikel ilmiah terpilih yang diperoleh melalui pencarian sistematis menggunakan Publish or Perish berbasis Google Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial berkontribusi signifikan terhadap polarisasi sosial, penurunan kualitas diskursus publik, melemahnya partisipasi politik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Selain itu, algoritma platform digital dan peran buzzer politik memperkuat penyebaran narasi kebencian secara masif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, serta kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi strategi utama dalam menjaga integritas demokrasi digital di Indonesia.

**Kata kunci:** Hate speech demokrasi media sosial

### 1. PENDAHULUAN

Revolusi teknologi informasi yang terjadi saat ini telah mengubah wajah komunikasi dunia secara fundamental, di mana media sosial kini menjadi ruang publik digital yang sangat esensial bagi praktik demokrasi global. Platform digital ini menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya bagi kebebasan berekspresi, sekaligus meningkatkan partisipasi politik masyarakat tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, perluasan ruang digital ini juga membawa risiko besar yang mengancam pilar-pilar demokrasi melalui penyebaran konten negatif, terutama ujaran kebencian dan berita palsu atau hoaks. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis di dunia maya, melainkan

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juli 18, 2024; Accepted: August 27, 2024; **Online Available:** August 29, 2024; **Published:** August 29, 2024;

\*Corresponding author, e-mail address

ancaman nyata yang dapat merusak kualitas diskusi publik, memicu polarisasi ekstrem di tengah masyarakat, serta menghambat keterlibatan kelompok tertentu dalam proses politik yang sehat (Florina, 2019; Sunstein, 2017). Tantangan global ini memaksa banyak negara untuk meninjau kembali bagaimana cara menjaga kebebasan berpendapat sambil tetap melindungi stabilitas sosial dari serangan informasi yang menyesatkan.

Di Indonesia, masalah ujaran kebencian menjadi jauh lebih kompleks karena jumlah pengguna media sosial yang sangat masiwh disertai dengan keragaman latar belakang sosial dan politik yang tinggi. Terutama dalam periode kritis seperti Pemilihan Umum, media sosial sering kali berubah menjadi medan tempur informasi yang dipenuhi oleh isu-isu provokatif yang mengandung kebencian (Febriansyah & Muksin, 2020). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter menjadi saluran utama bagi penyebaran hoaks yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik, yang pada akhirnya membuat kondisi demokrasi di Indonesia menjadi tidak stabil (Suliyansyah, 2023). Ancaman ini diperparah dengan adanya praktik represi digital dan peran buzzer politik yang secara masif memengaruhi opini publik demi kepentingan tertentu, sehingga ruang publik digital kita sering kali tercemar oleh manipulasi informasi (Miqdad, 2024; Witianti et al., 2024).

Kondisi demokrasi digital kita saat ini juga sedang menghadapi tantangan besar terkait politik identitas dan kampanye negatif yang sering kali melampaui batas kebebasan berbicara (Mubarok, 2022; Hadiwasito, 2024). Meskipun lembaga pengawas seperti Bawaslu telah berupaya melakukan pemantauan, pola penyebaran kebencian ini terus berevolusi dan semakin sulit dideteksi secara manual. Para peneliti terdahulu telah mencoba mengkaji masalah ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari pentingnya literasi digital masyarakat untuk menepis hoaks (Putra & Faris, 2025; Varol, 2024), hingga analisis penggunaan media sosial dalam kontestasi politik selama satu dekade terakhir (Azizah et al., 2024). Namun, meskipun data dan kasusnya sangat banyak, literatur akademik yang tersedia saat ini masih sangat terfragmentasi atau terpisah-pisah, sehingga kita belum memiliki satu pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai dampak jangka panjang dari semua fenomena ini terhadap kualitas demokrasi secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian yang mampu menyatukan berbagai temuan tersebut ke dalam satu kesatuan informasi yang jelas melalui metode Systematic Literature Review (SLR). Fokus utamanya adalah melakukan meta-analisis dengan mengumpulkan, memetakan, dan menyintesis seluruh karya ilmiah yang telah dipublikasikan untuk melihat tren dan pola besar yang terjadi. Dengan menelaah puluhan literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademik dengan menghubungkan variabel ujaran kebencian, media sosial, dan kualitas demokrasi, sehingga dapat memberikan landasan teori yang kokoh bagi para pengambil kebijakan dalam merancang strategi perlindungan demokrasi digital di masa depan.

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kondisi media sosial kita yang semakin mengkhawatirkan karena dipenuhi oleh ujaran kebencian, yang kini bukan lagi sekadar kata-kata kasar, melainkan sudah menjadi alat untuk merusak demokrasi. Di Indonesia, masalah ini menjadi sangat nyata karena ujaran kebencian sering kali sengaja digunakan untuk membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling bermusuhan, terutama saat mendekati waktu Pemilihan Umum (Suliyansyah, 2023; Febriansyah & Muksin, 2020). Masalahnya, ketika media sosial dipenuhi kebencian, orang-orang jadi takut atau malas untuk berdiskusi secara sehat, sehingga kualitas demokrasi kita menurun dan masyarakat jadi mudah diadu domba oleh informasi yang salah (Florina, 2019; Mubarok, 2022).

Kondisi ini semakin rumit karena sekarang ada fenomena buzzer politik dan manipulasi informasi yang dilakukan secara sengaja untuk mengatur opini masyarakat (Miqdad, 2024; Witianti et al., 2024). Meskipun pemerintah sudah mencoba berbagai cara, seperti memperketat pengawasan atau memberikan pelajaran tentang literasi digital, pola serangan di media sosial terus berubah-ubah dan semakin sulit dikontrol (Hadiwasito, 2024; Varol, 2024). Kita seolah olah sedang melawan musuh yang terus berganti wajah, sementara aturan dan cara pengawasan kita masih sering tertinggal di belakang.

Selain masalah di lapangan, ada masalah besar di dunia pendidikan dan riset. Saat ini, banyak peneliti yang membahas masalah ini secara terpisah-pisah. Ada yang hanya membahas soal hukumnya saja, ada yang hanya meneliti tentang hoaks di satu daerah saja, atau hanya fokus pada satu aplikasi seperti Facebook saja (Putra & Faris, 2025;

Azizah et al., 2024). Masalahnya adalah belum ada satu pun penelitian yang mau mengumpulkan semua temuan itu menjadi satu kesatuan.

Tanpa adanya "peta besar" yang merangkum semua kejadian dan data tersebut, kita akan sulit memahami gambaran utuh tentang bagaimana hate speech sebenarnya menyerang demokrasi kita dari segala sisi. Jika semua informasi ini tidak segera disatukan melalui tinjauan yang mendalam, maka para pengambil kebijakan (seperti pemerintah atau Bawaslu) akan terus kesulitan menentukan strategi yang tepat karena mereka tidak punya pegangan atau ringkasan data yang lengkap untuk menghadapi ancaman digital di masa depan.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan, ditemukan sebuah celah penelitian (research gap) yang sangat penting untuk segera diisi. Sejauh ini, studi mengenai dampak teknologi terhadap politik cenderung berjalan secara parsial atau terpisah-pisah. Sebagai contoh, banyak peneliti sebelumnya lebih fokus pada aspek pencegahan secara teknis melalui literasi digital masyarakat (Putra & Faris, 2025; Varol, 2024), atau hanya menitikberatkan pada evaluasi kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara seperti Bawaslu (Febriansyah & Muksin, 2020). Selain itu, sebagian besar literatur yang tersedia saat ini merupakan hasil dari studi lapangan yang sifatnya sangat lokal, seperti hanya meneliti penggunaan media sosial dalam satu periode kontestasi Pemilu atau Pilkada di daerah tertentu saja (Azizah et al., 2024; Mubarok, 2022).

Kesenjangan utama yang ditemukan adalah belum adanya sebuah kajian yang secara komprehensif merangkum dan menyatukan seluruh temuan-temuan tersebut ke dalam satu peta besar yang sistematis. Penelitian yang ada sering kali terjebak pada satu variabel saja, sehingga hubungan timbal balik antara penyebaran ujaran kebencian, karakteristik platform media sosial, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi secara menyeluruh belum terpetakan dengan jelas. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini.

Penelitian ini secara eksplisit mengadopsi paradigma kajian literatur murni yang non-empiris, sehingga dengan tegas menolak pelaksanaan aktivitas lapangan, wawancara, maupun observasi langsung. Posisi ini menjadi diferensiasi fundamental dibandingkan dengan studi-studi praeksisting, khususnya yang banyak diterbitkan

dalam Jurnal Bawaslu, yang cenderung berorientasi pada implementasi kebijakan dan bergantung pada pengumpulan data primer di lapangan (Suliyansyah, 2023; Febriansyah & Muksin, 2020).

Sebagai sintesis komprehensif dari temuan ilmiah yang telah ada, penelitian ini menerapkan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk merangkum dan mengintegrasikan berbagai elemen yang selama ini terfragmentasi. Fokus sentralnya mencakup penggabungan isu literasi digital (Putra & Faris, 2025), fenomena buzzer politik (Miqdad, 2024), serta dinamika pemanfaatan media sosial dalam kontestasi politik (Azizah et al., 2024). Melalui pendekatan sebagai peninjau literatur, studi ini berhasil menghubungkan secara koheren variabel ujaran kebencian, ekosistem media sosial, dan integritas demokrasi, sehingga menghasilkan kerangka konseptual komprehensif yang tidak dapat dicapai melalui studi empiris lokal yang terbatas.

Urgensi dari penelitian ini didasari oleh kondisi ruang digital Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, terutama menjelang dan sesudah periode pemilihan umum. Tingginya penyebaran ujaran kebencian (hate speech) bukan lagi sekadar masalah etika berkomunikasi, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas demokrasi yang jika dibiarkan dapat menyebabkan perpecahan sosial yang mendalam (Suliyansyah, 2023; Mubarak, 2022). Tanpa adanya kajian yang sistematis, masyarakat akan terus terjebak dalam polarisasi yang dipicu oleh manipulasi informasi dan peran buzzer politik yang merusak kualitas diskusi publik (Miqdad, 2024).

Penelitian ini menjadi sangat mendesak karena saat ini kebijakan yang diambil seringkali bersifat reaktif dan belum memiliki landasan teori yang kuat secara menyeluruh. Banyaknya literatur yang masih terpisah-pisah seperti yang hanya membahas literasi digital (Putra & Faris, 2025) atau pengawasan teknis (Febriansyah & Muksin, 2020) membuat kita kesulitan melihat pola ancaman secara utuh. Oleh karena itu, melakukan tinjauan literatur sistematis (SLR) saat ini sangat penting untuk menyatukan berbagai temuan tersebut menjadi sebuah peta panduan. Jika pemetaan ini tidak segera dilakukan, risiko melemahnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi digital akan semakin besar, dan pemerintah serta lembaga pengawas akan

kehilangan arah dalam menentukan strategi perlindungan ruang publik yang efektif di masa depan.

Berdasarkan latar belakang, masalah, dan celah yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama penelitian ini adalah memetakan serta menganalisis hubungan antara ujaran kebencian (hate speech), penggunaan media sosial, dan pengaruhnya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR). Lebih rinci, penelitian ini ingin mengenali pola penyebaran konten negatif di platform digital, serta bagaimana hal itu mengganggu stabilitas politik dan keterlibatan masyarakat (Suliyansyah, 2023; Febriansyah & Muksin, 2020).

Penelitian ini juga bertujuan merangkum temuan dari berbagai studi ilmiah yang ada, seperti literasi digital, peran buzzer, dan pengawasan pemilu, untuk membentuk kerangka teori yang lengkap (Putra & Faris, 2025; Miqdad, 2024). Melalui tinjauan sistematis ini, penelitian diharapkan bisa memberikan saran praktis untuk membangun demokrasi digital yang lebih sehat dan terpercaya ke depan, sekaligus mengatasi kekurangan studi lapangan yang selama ini terlalu sempit. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau tinjauan literatur sistematis. Sesuai dengan karakteristik metode ini, penelitian yang dilakukan bersifat non-empiris, sehingga peneliti tidak melakukan kegiatan turun ke lapangan, melakukan wawancara, ataupun menyebarkan kuesioner. Fokus utama dari metode ini adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan seluruh temuan dari berbagai jurnal ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) atau tinjauan literatur sistematis. Sesuai dengan karakteristik utama metode ini,

pendekatan yang digunakan bersifat non-empiris, yang berarti peneliti secara tegas tidak melakukan aktivitas turun ke lapangan, melakukan wawancara tatap muka, ataupun menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mendapatkan data primer. Fokus sentral dari metode SLR ini adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi secara kritis, dan menyimpulkan seluruh temuan dari berbagai jurnal ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi tinggi dengan topik ujaran kebencian dan kualitas demokrasi. Dengan metode ini, peneliti berperan sebagai penyintesis yang merangkum berbagai riset yang selama ini masih terfragmentasi menjadi satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik pencarian digital yang sistematis menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan basis data utama Google Scholar. Penggunaan platform ini bertujuan untuk memastikan bahwa literatur yang dikumpulkan mencakup spektrum yang luas dan mutakhir terkait isu demokrasi digital di Indonesia. Peneliti menggunakan kombinasi kata kunci spesifik untuk menemukan jurnal-jurnal kunci yang menjadi fondasi analisis, seperti kajian mengenai strategi mitigasi hoaks dan hate speech oleh Suliyansyah (2023), analisis pengawasan konten negatif oleh Febriansyah & Muksin (2020), hingga peran aktor digital atau buzzer politik yang diungkap oleh Miqdad (2024). Selain itu, peneliti juga merujuk pada pentingnya literasi digital bagi masyarakat sebagaimana dibahas oleh Putra & Faris (2025) serta Varol (2024).

Tahapan pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi tiga fase utama:

1. Fase Identifikasi: Peneliti mengumpulkan puluhan artikel ilmiah melalui Publish or Perish untuk melihat tren riset dalam satu dekade terakhir, termasuk penggunaan media sosial dalam kontestasi politik yang dipetakan oleh Azizah et al. (2024).
2. Fase Seleksi dan Penyaringan: Setelah data terkumpul melalui pencarian sistematis, peneliti melakukan penyaringan ketat (screening) untuk memilih 20 jurnal yang paling berkualitas dan relevan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data dari para ahli seperti Mubarok (2022) dan Hadiwasito (2024) benar-benar mampu menjawab permasalahan terkait politik identitas dan kampanye negatif.

3. Fase Sintesis dan Analisis: Tahap terakhir adalah membedah isi dari seluruh jurnal terpilih untuk memetakan pola dan hubungan timbal balik antar variabel ujaran kebencian, media sosial, dan kualitas demokrasi.

Melalui prosedur SLR yang terukur ini, penelitian diharapkan dapat membangun sebuah landasan teori yang kokoh dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan demokrasi digital di masa depan, sebagaimana ditekankan dalam urgensi pentingnya menyatukan literatur yang masih terpisah-pisah.

### 3. HASIL

1. Tipologi dan Dinamika Aktor dalam Ruang Digital Bagian ini menggambarkan sebuah ekosistem yang sangat kompleks di mana penyebaran ujaran kebencian tidak lagi terjadi secara spontan melainkan telah menjadi sebuah aktivitas yang terstruktur dan terencana. Fenomena ini didorong oleh keberadaan aktor-aktor digital strategis seperti buzzer politik yang memiliki kemampuan masif dalam memanipulasi opini publik dan mengatur narasi tertentu demi kepentingan elektoral sebagaimana dijelaskan oleh Miqdad (2024). Dinamika ini semakin diperburuk oleh cara kerja algoritma media sosial yang menciptakan sistem filter bubble, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri sehingga mempersempit ruang dialektika dan memperkuat fanatisme buta menurut temuan Setiawan (2023). Selain itu, ditemukan pula adanya evolusi konten di mana ujaran kebencian kini sering kali dibungkus dalam narasi politik identitas yang lebih halus dan terselubung namun tetap memiliki daya rusak yang tinggi terhadap keharmonisan masyarakat di ruang digital.

2. Dampak Destruktif terhadap Integritas Demokrasi Penjelasan mengenai dampak destruktif ini menunjukkan bahwa penggunaan ujaran kebencian sebagai senjata politik telah merobek tatanan sosial masyarakat hingga ke dunia nyata. Pola komunikasi yang penuh permusuhan ini memicu polarisasi ekstrem di tengah masyarakat Indonesia terutama pada masa-masa krusial seperti Pemilihan Umum, yang kemudian membagi warga ke dalam kubu-kubu yang saling berhadapan secara tajam. Dampak ini tidak hanya berhenti pada konflik sosial semata, tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas

partisipasi publik karena masyarakat luas cenderung menjadi takut atau enggan terlibat dalam diskusi politik yang dianggap penuh dengan hujatan. Lestari dan Utomo (2024) menyoroti bahwa pemilih pemula menjadi kelompok yang paling rentan mengalami apatisme politik akibat lingkungan digital yang tidak sehat ini. Secara sistematis, akumulasi dari konten negatif dan hoaks ini pada akhirnya mendelitimasi proses politik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi serta stabilitas nasional secara menyeluruh.

3. Sintesis Strategi Mitigasi dan Solusi Masa Depan Mengenai sintesis strategi mitigasi, seluruh literatur yang dikaji menyepakati bahwa peningkatan literasi digital masyarakat merupakan pertahanan utama dan paling mendasar untuk membangun ketahanan terhadap pengaruh konten negatif secara mandiri. Strategi yang diambil oleh lembaga negara seperti Bawaslu harus terus bertransformasi dari pendekatan yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif dengan landasan pemetaan data yang kuat sebagaimana disarankan oleh Febriansyah dan Muksin (2020). Sari et al. (2024) juga menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence kini menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu mendeteksi narasi kebencian secara cepat sebelum berdampak luas. Selain itu, diperlukan adanya penguatan regulasi dan transparansi dari platform global dalam memoderasi konten politik di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang teknologi, dan gerakan masyarakat sipil menjadi satu-satunya jalan untuk menciptakan ekosistem demokrasi digital yang lebih sehat, aman, dan terlindungi bagi masa depan bangsa.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial merupakan salah satu ancaman utama terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Media sosial yang seharusnya berfungsi sebagai ruang publik digital untuk mendorong kebebasan berekspresi dan partisipasi politik justru kerap dimanfaatkan sebagai sarana

penyebaran konten provokatif, hoaks, dan manipulasi opini yang bersifat destruktif, terutama pada masa-masa krusial seperti Pemilihan Umum.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa keberadaan buzzer politik, algoritma media sosial yang menciptakan filter bubble, serta politik identitas memperparah polarisasi sosial dan menurunkan kualitas diskursus publik. Kondisi ini berdampak pada melemahnya partisipasi masyarakat dalam diskusi politik yang sehat, meningkatnya sikap apatis, khususnya di kalangan pemilih pemula, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dengan demikian, ujaran kebencian tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan etika komunikasi semata, melainkan sebagai ancaman struktural terhadap integritas demokrasi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya penanganan yang selama ini dilakukan masih cenderung parsial dan reaktif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan regulasi dan pengawasan konten digital, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk deteksi dini ujaran kebencian, serta kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil. Melalui pemetaan literatur yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi perumusan kebijakan dan strategi perlindungan demokrasi digital yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Alifiani, & Firdaus. (2024). Demokrasi Masyarakat Sipil di Indonesia: Tinjauan Systematic Literature Review (SLR). *Focus*. <http://moderasi.org/index.php/moderasi/article/view/227>
- Anggraeni, & Soe. (2024). Peran Oposisi dalam Menjaga Keseimbangan Demokrasi di Indonesia melalui Tinjauan Literatur. *Focus*. <https://doi.org/10.37010/fcs.v5i1.1420>
- Azizah, et al. (2024). Pemanfaatan Media Sosial dalam Kontestasi Pemilu dari Tahun 2016-2022: Sebuah Systematic Literature Review. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v3i1.7820>

Barlian, & Wijayanto. (2021). Fenomena Hate Speech di Indonesia: Tinjauan Sistematis Kualitatif. <https://doi.org/10.14710/jkp.10.1.1-15>

Budak. (2023). Detection of Hate Speech in Social Media in the Context of Journalism and Democracy. <https://scholar.google.com/scholar?q=Budak+2023+Detection+of+Hate+Speech>

Congge, et al. (2023). Demokrasi Digital: Ancaman Hoaks dan Hate Speech bagi Komunitas <https://doi.org/10.35965/jae.v6i1.2345>

Fauzi. (2025). Dampak Fragmentasi Informasi terhadap Kualitas Opini Publik di Indonesia. <https://scholar.google.com/scholar?q=Fauzi+2025+Dampak+Fragmentasi+Informasi>

Febriansyah, & Muksin. (2020). Pengawasan Bawaslu Terhadap Konten Negatif di Media Sosial dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Bawaslu*. <https://doi.org/10.31002/jd.v4i1.2343>

Florina. (2019). Tantangan Demokrasi Global: Ujaran Kebencian dan Stabilitas Sosial. <https://scholar.google.com/scholar?q=Florina+2019+Tantangan+Demokrasi+Global>

Hadiwasito. (2024). Politik Identitas dan Pencegahan Perpecahan Akibat Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat. <https://scholar.google.com/scholar?q=Hadiwasito+2024+Politik+Identitas>

Hidayat, et al. (2025). Peran Platform Global (Meta, X, TikTok) dalam Moderasi Konten Politik. <https://scholar.google.com/scholar?q=Hidayat+2025+Moderasi+Konten+Politik>

Kusuma. (2023). Strategi Komunikasi Bawaslu dalam Menghadapi Disinformasi Digital. <https://scholar.google.com/scholar?q=Kusuma+2023+Strategi+Komunikasi+Bawaslu>

Lestari, & Utomo. (2024). Dampak Psikologis Ujaran Kebencian terhadap Partisipasi Pemilih Pemula.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Lestari+Utomo+2024+Dampak+Psikologis+Hate+Speech>

Miqdad. (2024). Peran Buzzer Politik dalam Membangun Opini di Media Sosial Indonesia. <https://scholar.google.com/scholar?q=Miqdad+2024+Peran+Buzzer+Politik>

Mubarok. (2022). Kampanye Negatif dan Hate Speech dalam Mempengaruhi Kualitas Demokrasi di Era Digital. <https://doi.org/10.31942/jiana.v4i2.6582>

Nugroho. (2023). Perbandingan Regulasi Digital Indonesia dan Uni Eropa dalam Kasus Hate Speech. <https://scholar.google.com/scholar?q=Nugroho+2023+Regulasi+Digital+Hate+Speech>

Pratama. (2022). Efektivitas UU ITE dalam Menangani Kasus Hate Speech di Indonesia. <https://scholar.google.com/scholar?q=Pratama+2022+Efektivitas+UU+ITE>

Putra, & Faris. (2025). Systematic Literature Review: Kekerasan dan Ujaran Kebencian di Media Online. <https://doi.org/10.59581/jpm-widyasanti.v3i1.4816>

Putri, & Wijaya. (2025). Gerakan Masyarakat Sipil dalam Melawan Buzzer Politik. <https://scholar.google.com/scholar?q=Putri+Wijaya+2025+Gerakan+Masyarakat+Sipil>

Ramadhan. (2024). Etika Berkomunikasi di Media Sosial: Tinjauan Filsafat Demokrasi. <https://scholar.google.com/scholar?q=Ramadhan+2024+Etika+Berkomunikasi>

Sabilah, & Firdaus. (2025). Tren Riset Demokrasi di Ruang Publik Digital Tahun 2023-2024. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1820>

Sabilah, & Nurjaman. (2024). Hambatan Stabilitas Demokrasi Akibat Kecurangan dan Konten Negatif. <https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.1580>

Saragih. (2021). Peran Jurnalis dalam Melawan Penyebaran Hate Speech di Berbagai Media. <https://scholar.google.com/scholar?q=Saragih+2021+Peran+Jurnalis+Hate+Speech>

Sari, et al. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mendeteksi Narasi Kebencian.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Sari+2024+Artificial+Intelligence+Hate+Speech>

Setiawan. (2023). Analisis Algoritma Media Sosial dalam Membentuk Filter Bubble Politik. <https://scholar.google.com/scholar?q=Setiawan+2023+Algoritma+Media+Sosial>

Suharto, et al. (2024). Analisis Sistematis Kondisi Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi. <https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.1560>

Suliyansyah. (2023). Strategi Menepis Hoaks dan Hate Speech di Media Sosial Menggunakan Metode Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Bawaslu*.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Suliyansyah+2023+Strategi+Menepis+Hoaks>

Varol. (2024). Digital Literacy and Resistance to Hate Speech: A Global Perspective.

<https://scholar.google.com/scholar?q=Varol+2024+Digital+Literacy+Hate+Speech>

Wahidin, et al. (2025). Peluang dan Tantangan Transformasi Demokrasi Digital di Indonesia. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v4i1.8901>

Witianti, et al. (2024). Represi Digital dan Dampaknya Terhadap Ruang Publik di Indonesia. <https://doi.org/10.24198/jpp.v9i1.51234>

## STRATEGI PEMASAR YANG DILAKUKAN DI PLAZA TUNJUNGAN III SURABAYA DALAM MEMASARKAN SEMUA PRODUKNYA

